

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komite Audit memainkan peran yang krusial terhadap pengawasan laporan keuangan, kepatuhan kepada undang-undang, efektifitas dari aktivitas pengendalian internal, serta kemampuan perseroan dalam mengelola risiko dan menangani keluhan pelanggan. Komite ini dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Pentingnya peran Komite Audit direspon positif oleh BAPEPAM melalui Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 dan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 jo No. Kep-643/BL/2012. Peraturan ini mengharuskan setiap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib memiliki Komite Audit, dimana bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Contoh bagus sehubungan dengan independensi Komite Audit dapat dilihat pada kasus laporan keuangan per 31 Desember 2005 PT Kereta Api Indonesia. Ketua Komite Audit PT KAI menolak menandatangani laporan keuangan sekalipun telah diaudit oleh auditor eksternal, karena melihat beberapa akun salah saji material dan terdapat kemungkinan manajemen melakukan praktek manajemen laba. BAPEPAM pada akhirnya merilis beberapa perusahaan yang disinyalir melakukan kecurangan laporan keuangan, salah satunya adalah PT KAI, dan menjatuhkan sanksi atas

tindakan yang mencoreng etika profesi ini. Terungkapnya praktek manajemen laba oleh Komite Audit, disatu sisi menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara Komite Audit dengan manajemen dan auditor eksternal. Namun disisi lain, Komite Audit PT KAI telah melaksanakan dengan efektif salah satu tugas pentingnya, yaitu melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan.

Untuk mempertahankan integritas atas fungsi pengawasan, Komite Audit memerlukan pertanggungjawaban kinerja terutama kepada dewan komisaris. Salah satu proxy dalam mengukur pertanggungjawaban Komite Audit, yaitu dengan melihat frekuensi *meeting* (Raghunandan dan Rama, 2007) yang dilakukan oleh Komite Audit selama 1 (satu) tahun. Materi dalam *meeting* diantaranya pembahasan tentang akurasi pelaporan keuangan, isu-isu signifikan, penemuan-penemuan yang memerlukan tindak lanjut, serta *planning* kerja selanjutnya. Dengan demikian, semakin sering melakukan *meeting*, menunjukkan semakin aktif dan efektif komite audit dalam menjalankan profesinya. Peraturan BAPEPAM mengharuskan komite audit melakukan *meeting* 4 (empat) kali selama setahun.

Sharma, *et el* (2009), dalam penelitiannya mengusung beberapa variabel yang diduga mempengaruhi frekuensi *meeting* komite audit. Diantaranya adalah jumlah Komite Audit, ukuran KAP, dan kepemilikan manajerial.

Jumlah Komite Audit dapat meningkatkan atau menurunkan frekuensi rapat komite audit. Komite audit yang besar memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat manajerial, sehingga memberikan *monitoring* yang lebih efektif, sehingga dapat mengurangi frekuensi rapat komite audit. Sebaliknya, komite audit

yang lebih besar mungkin merupakan bentuk *governance* yang tidak efisien, sehingga meningkatkan frekuensi rapat komite audit. Memiliki anggota lebih banyak bisa menyebabkan keragaman perspektif yang lebih nyata dalam diskusi (Sutaryo dkk, 2010).

Kantor akuntan publik dalam kategori Big 4 auditor sering dianggap dapat memberikan audit berkualitas tinggi. Audit kualitas yang lebih tinggi terkait dengan kemungkinan berkurangnya dari masalah pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang lebih efektif. Knechel dan Willekens (2006) mengandaikan bahwa perusahaan Big 4 audit adalah pengganti untuk *monitoring* internal khususnya di pasar modal di negara sedang berkembang seperti Indonesia dengan efisiensi setengah kuat. Oleh karena itu, apabila perusahaan menggunakan jasa auditor dalam kelompok BIG 4 cenderung lebih banyak melakukan interaksi dan komunikasi dengan Komite Audit perusahaan dalam rapat Komite Audit, sehingga meningkatkan frekuensi rapat Komite Audit perusahaan (Sutaryo, 2009).

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi biaya agensi, sebab saham yang dimiliki direktur akan memotivasi manajemen berperilaku atau berpandangan sama dengan *shareholders*. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial secara khusus mensubsitisi mekanisme monitoring. Semakin besar kepemilikan manajerial, loyalitas terhadap perusahaan akan semakin tinggi, sehingga dapat meminimalisir tindakan kecurangan. Selanjutnya tidak diperlukan tambahan-tambahan *meeting* oleh komite audit, karena penemuan terhadap praktek manajemen laba mungkin tidak ada (Sharma, 2009).

Subjek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang tahun 2011-2013. Sektor-sektor dalam industri finansial terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dan investasi. Perusahaan finansial dipilih sebagai populasi dikarenakan dalam pengujian variabel kontrol industri yang dilakukan oleh Sutaryo, dkk memperoleh hasil bahwa kelompok industri berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kelompok industri yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dan investasi mempunyai frekuensi rapat komite audit yang berbeda. Perusahaan dalam kelompok industri finansial mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan pengawasan operasional perusahaan melalui rapat komite audit. Perusahaan kelompok industri finansial mempunyai peraturan tersendiri yang lebih ketat mewajibkan perusahaan untuk membentuk mekanisme *good corporate governance* yang salah satunya adalah komite audit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat ditarik rumusan masalah :

“ Apakah jumlah Komite Audit, ukuran KAP dan kepemilikan manajerial, mempunyai pengaruh signifikan terhadap frekuensi *meeting* komite audit?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan bukti empiris atas pengaruh jumlah Komite Audit, ukuran KAP dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan terhadap frekuensi *meeting* Komite Audit.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi dunia bisnis, memberikan masukan pentingnya peran komite audit terkhusus dalam hal pengawasan terhadap kinerja manajemen.
2. Bagi penelitian, memberikan tambahan kajian berkenaan dengan peran komite audit dalam praktek sesungguhnya.

1.5 Sistematika Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika skripsi secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas dan jelas mengenai latar belakang masalah yaitu pemahaman frekuensi *meeting* Komite Audit dan contoh kasus independensi Komite Audit yang terjadi di Indonesia serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya rapat Komite Audit. Dari latar belakang masalah, dapat ditarik rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori yaitu *agency theory*, *good corporate governance*, pengertian Komite Audit, peran dan tanggung jawab Komite Audit, wewenang Komite Audit, pertemuan Komite Audit, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi *meeting* Komite Audit. Selain itu, diuraikan pula penelitian-penelitian terdahulu serta hipotesis dalam model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang keadaan perusahaan yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan interpretasi mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis penelitian akan digunakan untuk membuat kesimpulan dan saran pada bab berikutnya.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil pembahasan dan saran yang diberikan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi *meeting* Komite Audit serta saran untuk penelitian selanjutnya.